

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>News Title</b> : Hindari Intervensi Bursa CPO                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|                                                                                   | <b>Media Name</b> : Bisnis Indonesia                                                                                                                                                                                                  | <b>Journalist</b> : Artha Adventy, Dwi Rachmawati |
|                                                                                   | <b>Publish Date</b> : 12 October 2023                                                                                                                                                                                                 | <b>Tonality</b> : Positive                        |
|                                                                                   | <b>News Page</b> : 3                                                                                                                                                                                                                  | <b>News Value</b> : 562,500,000                   |
|                                                                                   | <b>Resources</b> : P Giri Hatmoko (Head of Corporate Communication ICDX), Eddy Martono (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)), Gulat Manurung (Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)) | <b>Ads Value</b> : 187,500,000                    |
|                                                                                   | <b>Section/Rubrication</b> : Editors Choices                                                                                                                                                                                          | <b>Topic</b> : Bursa CPO                          |

| PERDAGANGAN KELAPA SAWIT |

# HINDARI INTERVENSI BURSA CPO

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah harus menghindari intervensi dan kepentingan terkait dengan rencana pembentukan Bursa CPO Indonesia. Langkah itu akan memberi ruang bagi terciptanya aktivitas perdagangan yang kredibel dan transparan.

Artha Adventy & Dwi Rachmawati  
redaksi@bisnis.com

**B**adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah menunjuk Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagai penyelenggara Bursa CPO Indonesia. ICDX telah menerima persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Fisik CPO dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Persetujuan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bappebti No 1/Bappebti/SC-SCPO/10/2023, yang dikeluarkan pada Senin (9/10). "ICDX berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di Bursa dari pemerintah," kata Head of Corporate Communication ICDX P Giri Hatmoko dalam keterangan resminya, Rabu (11/10).



**Pemerintah harus menyakinkan dan memastikan intervensi dari pemerintah untuk mendukung itu minim.**

Giri Hatmoko melanjutkan, ICDX akan menyampaikan hal-hal teknis terkait mekanisme perdagangan dan lain-lain, pada saat *launching* Bursa CPO Indonesia bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hadirnya Bursa CPO di Indonesia dinilai tidak mudah. Selama ini, aktivitas perdagangan *crude palm oil* (CPO) atau kelapa sawit mengacu ke bursa di luar negeri. Artinya, semua pemangku kepentingan perlu menciptakan sistem perdagangan di dalam negeri yang mampu menarik minat investor untuk melakukan perdagangan di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menyatakan pembentukan Bursa CPO di Indonesia dinilai tidak mudah. Intervensi yang minim jadi salah satu syarat agar bursa diakui di pasar global. Nantinya setiap ekspor CPO wajib dilakukan melalui bursa berjangka CPO. Selama ini, perdagangan CPO Indonesia masih mengacu pada bursa Rotterdam dan Malaysia (MDEX). "Pemerintah harus menyakinkan dan memastikan intervensi dari pemerintah untuk mendukung itu minim," kata Piter. Menurutnya, kewajiban bagi institusi untuk melakukan ekspor melalui bursa berjangka dalam negeri juga tidak akan serta merta menghilangkan peran bursa Rotterdam dan Malaysia. Alasannya, untuk menciptakan rujukan harga global, sebuah bursa harus teruji



kredibilitasnya.

Piter menyebut bursa Rotterdam dan Malaysia pun sudah melalui jalan panjang hingga puluhan tahun untuk diakui pelaku usaha secara global. Oleh karena itu, pemerintah, kata Piter juga perlu memberikan insentif kepada pelaku usaha agar turut bertransaksi melalui bursa CPO tanpa paksaan. "Tetapi pemerintah harus konsisten bagaimana bursa CPO itu adalah benar-benar berdasarkan mekanisme pasar sehingga harga yang terbentuk adalah harga yang kredibel," ujar Piter.

Sebaliknya, dia memandang bahwa pengaturan ekspor CPO dan produk-produk turunannya yang terlalu ketat melalui bursa CPO, justru akan menjadi boomerang bagi Indonesia dan merugikan industri sawit.

Negara penghasil barang, kata Piter, tidak harus selalu menjadi penentu harga.

"Pasar yang kredibel, efisien dan tidak mengalami distorsi, akan

menjadi acuan bersama," katanya.

## HITUNG BIAYA

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan para pengusaha mempertimbangkan biaya *mandatory* bursa yang berisiko terhadap harga CPO yang tidak lagi kompetitif.

"Ini akan membuat pembeli berpindah ke negara produsen lain," ujar Eddy.

Adapun pertimbangan harga akan menjadi lebih mahal lantaran saat harga referensi CPO menjauhi *threshold* (ambang batas) US\$680 per ton, pemerintah menetapkan pungutan ekspor (PE) sebesar US\$85 per ton dan bea keluar (BK) sebesar US\$33 per ton.

Menurut dia, adanya biaya *mandatory* bursa hanya akan menambah beban pelaku usaha. "Kalau ditambah beban biaya bursa, di khawatirkan harga kita menjadi tidak kompetitif," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aso-

siasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung memandang bahwa pembentukan bursa CPO merupakan amanat presiden Joko Widodo terhadap Menteri Perdagangan agar dapat menciptakan *price reference* (harga referensi) CPO Indonesia secara mandiri.

"Kami petani sawit bersikeras mengatakan bahwa bursa CPO Indonesia ini bukan sekadar untung dan rugi tapi rasa nasionalis semua stakeholder sawit," kata Gulat. Melalui bursa CPO, nantinya harga CPO akan menjadi acuan harga beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani di pabrik kelapa sawit.

Adapun di hilir, lanjut Gulat, harga CPO yang terbentuk di bursa akan menjadi harga patokan ekspor yang transparan. Menurutnya, manfaat bursa CPO bukan hanya bermanfaat untuk keperluan ekspor, tapi juga memungkinkan untuk transaksi CPO untuk keperluan domestik. ■